

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PT. PLN  
(PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Jurusan Akuntansi



Oleh

Nama : Sriana  
NPM : 1305170495  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADUYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**SRIANA. NPM. 1305170495. Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, 2017. Skripsi.**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab *Return On Investment*, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri mengalami penurunan dan untuk menganalisis *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Jenis penelitian bersifat deskriptif, dengan obyek penelitian adalah sisi keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Dimana pada penelitian ini menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah ROE, ROI, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, TATO, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik belum mampu meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa rasio yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN antara lain ROI, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri.

***Kata kunci* : *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan diukur dengan rasio keuangan yang telah ditetapkan standar BUMN.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya yang diberikan, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat tabit dan tabi'in sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**" sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan S-1 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT karena atas kehendakNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Ayahanda Sunardi dan Ibunda Ponikem yang sangat mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QIA., Ak., CA., CPAI selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Adik-adik tersayang Sri Anita, Subayu, Yunda, serta Kakek Tupon dan Nenek Tarmini, Paklek Legiman dan Bulek Rahmadina yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman paling unik Mentari N, Siska S, Nova R, Sugiarti M, Diana D, Vemmy M, Harnina Lubis, Setyawati S, Ummu H, Sriwahyuni S, Seri M, Hazizah M, Winda T, Afdila M, Mhd. Fakhrur R, dan Wahyu Hidayat.
11. Dia yang terbaik Wiwit Aryo Santoso yang telah memberikan semangat luarbiasa kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi B Siang 2013.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua, Aamiin.

Medan, 2017  
Penulis

**SRIANA**  
**1305170495**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	13
1. Kinerja Keuangan Perusahaan.....	13
2. Jenis Analisa Laporan Keuangan .....	15
a. Rasio Likuiditas .....	15
b. Rasio Profitabilitas.....	15
c. Rasio Solvabilitas.....	16
d. Rasio Aktivitas.....	17
3. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	19
a. Teori <i>Good Corporate Governance</i> .....	22
b. Prinsip-prinsip GCG .....	24
c. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG .....	29
d. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip GCG ..	29
e. Organ Persero .....	30
f. Komite Penunjang Dewan Komisaris .....	35
g. Sekretaris Perusahaan .....	37
h. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG .....	38
4. Penelitian Terdahulu .....	40
B. Kerangka Berpikir .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Definisi Operasional Variabel.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	49
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	49
2. Kinerja Keuangan .....	51
3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	58
B. Pembahasan .....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I-1. Tabulasi Data Kinerja Keuangan.....	6
Tabel I-2. Tabulasi Data Skor <i>Good Corporate Governance</i> .....	7
Tabel II-1 Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Standar Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 .....	19
Tabel II-2. Penilaian Skor Indeks GCG Berdasarkan Keputusan Sekertaris Kementrian BUMN No : SK-16/S.MBU/2012.....	40
Tabel II-3 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel III-1 Indikator Wawancara GCG .....	45
Tabel III-2 Indikator Wawancara Kinerja Keuangan .....	46
Tabel III-3 Waktu Penelitian .....	46
Tabel IV-1 Perhitungan ROE .....	52
Tabel IV-2 Perhitungan ROI .....	53
Tabel IV-3 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> .....	54
Tabel IV-4 Perhitungan <i>Current Ratio</i> .....	55
Tabel IV-5 Perhitungan TATO .....	56
Tabel IV-6 Perhitungan Perputaran Persediaan .....	56
Tabel IV-7 Perhitungan <i>Collection Period</i> .....	57
Tabel IV-8 Perhitungan TMS .....	58
Tabel IV-9 Hasil skor GCG.....	59

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar III.1 Kerangka Berpikir .....	43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keadaan perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha baik perusahaan swasta maupun BUMN yang mengalami *failed*, dikarenakan tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu penyebab terjadinya peningkatan harga produk dan terjadinya penurunan daya beli konsumen. Sedangkan tujuan daripada perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba, sedangkan tujuan untuk memperoleh laba perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya, maka hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas baik kualitas jasa maupun kualitas produk.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

“Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.” (Anggita Sari dan Musmainah, 2012).

Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta *profit* yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Data keuangan perusahaan tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat. Laporan keuangan ini harus menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah ditetapkan prosedurnya sehingga laporan keuangan dapat diperbandingkan agar tingkat akurasi analisis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara maka perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan. Sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas dan aktivitas dalam perusahaan. Dengan demikian penggunaan analisis rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah

dicapai. Untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Saat ini PLN mempekerjakan 47.532 staf dari seluruh Indonesia dengan rasio 15,6% diantaranya berpendidikan sarjana dan pascasarjana. Untuk mengetahui kebutuhan akan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia bagi perkembangan teknologi, PLN akan selalu mengusahakan berbagai pendidikan dan kegiatan pelatihan jasa pendidikan baik dilingkungan PLN tersendiri maupun menjalin kerjasama dengan Universitas dan Lembaga didalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Unit-unit dibawah oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan (Jl. KL. Yos Sudarso No. 284 Medan) pada sekarang ini terdiri dari : Cabang Medan, Cabang Binjai, Cabang Lubuk Pakam, Cabang Pematang Siantar, Cabang Rantauprapat, Cabang Sibolga, dan Cabang Padang Sidempuan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik diharapkan pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PLN pada pasar rumah tangga maupun industri dan bisnis masih merupakan peluang bisnis yang besar karena rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita masih rendah serta Indonesia sendiri masih dalam tahap awal industrialisasi. Guna memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dalam 10 tahun kedepan diperlukan investasi sebesar US\$ 18,1 Milyar untuk tambahan kapasitas pembangkit sebesar 15.731 MW dan tambahan jaringan transmisi sepanjang 9.907 Kms.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan organisasi adalah dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan dan pengolahan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menentukan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga mewujudkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai publik maupun aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).

“Secara teoritis praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.” (Diah Kusuma, 2008 : 16).

Menurut I Nyoman Tjager (2003-2008), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik. Krisis pada tahun 1997 di Indonesia disertai dengan buruknya implementasi tata kelola pemerintahan menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk. Maka kesadaran terhadap tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta harus dimulai dan di implementasikan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* terlebih khusus prinsip-prinsipnya yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* (TARIF) menjadi suatu *issue* yang mengemuka untuk diperbincangkan, dan merupakan alat atau pelaksana tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi

prinsip-prinsip GCG memberikan implikasi positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Kinerja hingga prestasi yang mengagumkan dan membanggakan dapat diraih atau dicapai baik secara Nasional dan hingga pada taraf Internasional.

Kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip-prinsip GCG di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa (*regulatory driven*) bagi setiap perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Peraturan atau regulasi tersebut, antara lain adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pada awal tahun 2008, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah pembinaan Kementrian BUMN adalah sebanyak 140 BUMN dengan total aset lebih dari Rp 1.400 triliun dan bergerak di hampir seluruh bidang perekonomian. Sayangnya, kinerja BUMN secara keseluruhan belum begitu menggembirakan. Bahkan, masih terdapat beberapa BUMN yang menderita kerugian berlarut-larut sehingga akhirnya turut membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pada saat ini prinsip GCG belum sepenuhnya dilingkungan BUMN.

Bahkan masih terdapat beberapa BUMN yang belum memiliki kebijakan operasional tentang penerapan GCG.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor BUMN, maka pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan peraturan secara khusus mengatur mengenai dasar penerapan GCG bagi perusahaan BUMN melalui keputusan menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Bada Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan pada suatu perusahaan, maka perusahaan perlu memiliki alat bantu guna dapat mengukur tingkat keuangan. Dalam hal ini, kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang diukur berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 mengalami penurunan pada beberapa rasio, bahkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengalami kerugian tiap tahunnya.

**Tabel I-1. Tabulasi Data Kinerja Keuangan**

Keterangan	2011	2012	2013	2104	2015	Standar BUMN No : KEP- 100/MBU/2002
ROE	100%	100%	100%	100%	100%	>15%
ROI	-43%	-137%	-17%	-35%	-38%	>18%
<i>Cash Ratio</i>	9%	0%	0%	-6%	-6%	>35%
<i>Current Ratio</i>	60%	66%	174%	213%	195%	>125%
TATO	304%	308%	465%	503%	501%	>120%
Perputaran Persediaan	6x	7x	3x	2x	2x	4x
<i>Collection Periods</i>	2x	3x	15x	17x	16x	4x
Rasio Modal Sendiri Terhadap <i>Asset</i> (TMS)	-43%	-137%	-17%	-35%	-38%	30% s/d 40%

**Sumber : Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Hal ini diikuti dengan skor capaian *Good Corporate Governance* yang dikategorikan kedalam predikat sangat baik.

**Tabel I-2. Tabulasi Data Skor *Good Corporate Governance***

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	Standar BUMN No : KEP- 100/MBU/2002
Skor GCG	83,35%	81,52%	88,52%	84,62%	86,46%	>60%

**Sumber : Laporan Tata Kelola Perusahaan PT. PLN (Persero)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor *Good Corporate Governance* (GCG) untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dikategorikan dengan predikat sangat baik, hal ini tidak diikuti dengan kinerja keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang mengalami penurunan, untuk kinerja keuangan yang diukur dengan *Cash Ratio* dan Perputaran Persediaan untuk setiap tahunnya mengalami penurunan, begitu juga untuk *Return On Investment* (ROI) dan Total Modal Sendiri (TMS) mengalami penurunan setiap tahunnya dan jauh berada dibawah standar BUMN. Dan untuk rasio keuangan yang diukur berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU-2002.

Menurut Newel dan Wilson dalam artikelnya yang berjudul "*A Premium for Good Corporate Governance*" yang dikutip oleh Tjager et al (2003) dalam Arifin (2005) bahwa secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengirangi risiko merugikan akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sedangkan yang terjadi GCG belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Menurut Syamsuddin (2009, Hal.63) “*Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan”.

Menurut Syafri (2008, Hal.63), “Semakin tinggi ROI semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan beberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva”. Semakin rendah *Return On Investment* maka akan kurang baik bagi perusahaan begitupun sebaliknya, artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi suatu perusahaan.

Rasio kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar dengan kata lain *Cash Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan. Penurunan kas terjadi karena menurunnya ketersediaan uang kas yang dimiliki perusahaan. Penilaian terhadap kas mengalami penurunan dan telah berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 35%.

Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 011.E/DIR/2007 mendefinisikan, “Persediaan material adalah semua material yang dilakukan untuk melaksanakan program investasi maupun pemeliharaan yang pengadaannya dilakukan melalui Anggaran Investasi (AI) maupun Anggaran Operasi (AO).” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan material adalah material yang disediakan untuk program investasi ataupun pemeliharaan. “Semakin kecil rasio ini semakin jelek bagi perusahaan, demikian pula sebaliknya”. (Kasmir, 2015).



Rasio modal sendiri terhadap total aktiva menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan, begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu Wika Agustina Harahap (2016) menunjukkan bahwa *corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak menunjukkan keadaan yang tidak sejalan, dimana skor GCG mengalami peningkatan belum tentu kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Dan Nadia Guchi (2016) yang menyatakan penerapan GCG untuk menilai kinerja perusahaan belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan, terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor yang meningkat tidak diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan.

Ristifany (2009) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan memiliki hubungan searah yang sangat kuat. Dan Ridwan Frediawan (2008) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada fenomena diatas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung pencapaian kinerja keuangan. Dalam kaitan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “**Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah mengenai analisis penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan, yaitu :

1. *Return On Investment* (ROI) mengalami penurunan dan jauh berada dibawah standar BUMN.
2. *Cash Ratio* mengalami penurunan tiap tahunnya.
3. Perputaran Persediaan mengalami penurunan tiap tahunnya.
4. Total Modal Sendiri mengalami penurunan dan jauh berada dibawah standar BUMN.
5. Skor GCG mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara diukur dengan rasio *Return On Investment*, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri ?
2. Apa faktor penyebab rendah dan turunnya Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana penerapan GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ?
4. Mengapa GCG belum mampu meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara diukur dengan rasio *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab rendah dan turunnya Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis penerapan GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui penyebab GCG belum mampu meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.
2. Bagi Investor  
Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat penerapan GCG agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi perusahaan  
Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini penerapan GCG dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berniat untuk mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut dengan penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang dituangkan dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan pada periode tertentu.

Istilah kinerja atau *performance* sering kali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah motivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen.

Kinerja keuangan adalah penentu ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin

dikendalikan dimasa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya.

Ada beberapa pengertian analisis rasio ditemukan oleh beberapa ahli menurut Bambang Riyanto (2009 : 54) yang dikemukakan analisis rasio yaitu sebagai berikut : “Pengertian rasio disini sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam aritmatika *term* yang dapat digunakan untuk hubungan antara dua macam data *financial*.”

Menurut Sawir (2003 : 144), menyatakan bahwa :

“Dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standart rasio keuangan tersebut. Pengertian kinerja keuangan secara umum adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain.”

Menurut Kasmir (2012 : 16), menyatakan bahwa :

“Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan.”

Menurut Munawir (2010 : 31) pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas usaha.

## 2. Jenis Analisa Rasio Keuangan

### a. Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2007 : 31) menyatakan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Jenis-jenis rasio likuiditas :

#### 1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

#### 2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan.

#### 3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

### b. Rasio Profitabilitas

Menurut Munawir (2007 : 33), rasio profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan dapat diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif.

Jenis-jenis rasio profitabilitas :

1) *Profit Margin On Sales*

*Ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

2) *Return On Investment* (hasil pengembalian investasi)

ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

3) *Return On Equity* (hasil pengembalian ekuitas)

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

4) *Earning Per Share of Common Stock* (laba per lembar saham biasa)

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

**c. Rasio Solvabilitas**

Menurut Kasmir (2012 : 165), rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang.

Jenis-jenis rasio solvabilitas :

1) Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva

Rasio modal sendiri dengan aktiva merupakan rasio yang menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor.



2) Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap

Rasio modal sendiri dengan total aktiva tetap merupakan rasio yang dilakukan dengan membandingkan modal sendiri perusahaan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

3) Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Tetap

Rasio aktiva tetap dengan hutang tetap merupakan rasio yang dilakukan untuk mengukur tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur jangka panjang.

4) Nilai Buku Saham

Nilai buku per lembar saham dilakukan untuk menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada setiap lembar saham.

**d. Rasio Aktivitas**

Menurut Kasmir (2012 : 172) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Jenis-jenis rasio aktivitas :

1) Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode.

2) Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (*inventory*) berputar dalam satu periode.

3) Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*)

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu.

4) *Fixed Assets Turn Over*

*Fixed assets turn over* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.

5) *Total Assets Turn Over* (TATO)

*Total assets turn over* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Adapun penilaian aspek keuangan yang diukur berdasarkan standar Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Standar Kementerian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002**

<b>Rasio Keuangan</b>	<b>Standar BUMN</b>
ROE	20
ROI	15
Rasio Kas	5
Rasio Lancar	5
<i>Collection Periods (CP)</i>	5
Perputaran Persediaan	5
Perputaran <i>Total Asset</i>	5
Rasio Modal Sendiri Terhadap <i>Total Asset</i>	10
<b>Total Skor</b>	<b>70</b>

### 3. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance (GCG)*

Istilah tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan dari *Corporate Governance*. Kata *Governance* berasal dari perancis kuno yaitu *Governance* yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali (Subroto, 2005).

Istilah *Good Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Codbury Committee di tahun 1993 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Codbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandara (2008. Hal, 24-25) sebagai :

“Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktor, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000 : Shaw, 2003).

*Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholders*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri.

*Good Corporate Governance* merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat *control* dan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Definisi GCG menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sehubungan dengan titik berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, yaitu

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN karena digantikan dengan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) menyatakan bahwa :

“GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan *asset* perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Wardhani (2006), menyatakan bahwa “*corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan”. Isu mengenai *corporate governance* ini mulai mengemuka, khususnya di Indonesia setelah Indonesia mengalami masa kritis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan diperhatikan yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. *Corporate governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari Dewan Direksi, Pemegang Saham Institusional, dan Pengendalian dari Mekanisme

Pasar. Menurut I Nyoman Tjager (2003 : 2008) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.

**a. Teori *Good Corporate Governance***

1) Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep GCG timbul berkaitan dengan *principal agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*-nya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011).

Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya diajukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para *agent* adalah sesuai fungsi yang telah ditetapkan.

“Keleluasaan manajemen dalam mengelola dana guna mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan bisa mengarah pada memaksimalkan tambahan ekonomis bagi kepentingan pribadi (kepentingan para *agent*) dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga dalam menyajikan laporan atas penggunaan dan pengelolaan dana oleh para *agent* tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan yang sebenarnya” (Ernawan, 2011).

Dengan kata lain, para *agent* merekayasa laporan keuangan perusahaan guna menghindari risiko ditemukannya *fraud* yang

dilakukan. Disamping itu, kinerja manajemen yang diukur dari keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan, mendorong para *agent* untuk melakukan *earnings management* dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan dinilai baik oleh para pemegang saham.

Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para *agent*. GCG memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

## 2) Teori *Stakeholders*

Pengertian *stakeholders* atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan BUMN karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan BUMN. Perusahaan tidak hanya memandang bahwa *stakeholders* adalah investor dan kreditor saja, melainkan pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan.

“Pemerintah dapat dikatakan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena

itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis” (Sarwako, 2003).

Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting *stakeholders* dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap *stakeholders*, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan *stakeholders* agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

### 3) *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam tuntutan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya.

#### **b. Prinsip-prinsip GCG**

Menurut KNKG (2009), Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:



### 1) Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang penting atau *materil* dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, *comparable* dan mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* karena keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan *audit* yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Disamping itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Selain laporan keuangan, perusahaan menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada *stakeholders*, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

### 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari *agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham dan Direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk

menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aggaran dasar, etika bisnis, dan pedoman perilaku perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian *internal* (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

### 3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Dengan perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggungjawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai *Good Corporate Citizen*.

#### 4) Independensi (*Independency*)

Dalam hal ini, perusahaan dikelola secara *independent*, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak mendominasi atau melempar tanggungjawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas dan tanggungjawab dapat terlihat. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh dengan penetapan *job description* secara jelas dan memastikan setiap organ telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan.

#### 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap *asset* atau *capital* yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara *fair*, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud*, *insider trading* dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a) Dalam pengambilan keputusan perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran, masukan serta pendapat.
- b) Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam perusahaan.
- c) Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggungjawab semua organ perusahaan.
- d) Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar.
- e) Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara *professional*.

### **c. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG**

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
- 5) Dukungan dari pihak *stakeholders*.
- 6) Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

### **d. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip GCG**

Pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

*Governance*) pada BUMN, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain :

- 1) Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat tercapai.
- 2) Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *professional, transparant*, efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
- 3) Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholders* (melindungi hak *stakeholders*).
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.

#### **e. Organ Persero**

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, organ persero terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris, dan Direksi.

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 75 sampai dengan pasal 91, RUPS merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham

memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perusahaan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi-informasi itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat.

RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja para Pemegang Saham/Menteri.

Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat perusahaan melakukan kegiatan operasional. Selain ditempat perusahaan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi didalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Jenis RUPS terdiri dari :

- a) RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan.
- b) RUPS lainnya adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

Pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan keputusan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan pemegang saham ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. Keputusan pemegang saham diluar RUPS dapat dilakukan dalam bentuk keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS/Menteri.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, hak-hak pemegang saham antara lain :



- a) Mendapatkan perlakuan yang sama (setara) antar pemegang saham.
- b) Menghadiri dan mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c) Mendapatkan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan BUMN secara tepat waktu, terukur dan teratur.

Informasi tersebut antara lain :

- (1) Panggilan untuk RUPS.
- (2) Informasi laporan metode perhitungan, penentuan serta rincian atas gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan.
- (3) Informasi mengenai Rencana Kerja Perusahaan dan Anggaran Perusahaan.
- (4) Informasi keuangan perusahaan.
- (5) Informasi yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

- d) Menerima dividen sesuai dengan komposisi modal yang ditanamkan.
- e) Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

## 2) Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 pasal 12, diatur mengenai fungsi Dewan Komisaris, antara lain :

- a) Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b) Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan BUMN.
- c) Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- d) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- e) Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
- f) Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam suatu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.

### 3) Dewan Direksi (*Board Of Director/BOD*)

Tugas dan fungsi utama Dewan Direksi menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi (Harahap, 2009).

#### **f. Komite Penunjang Dewan Komisaris**

Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan, maka Komisaris dapat meminta saran, nasihat, pendapat pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Komite tersebut antara lain :

##### 1) Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ketua Komite Audit bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan berkala. Menurut KNKG (2006), Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan :

- a) Laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan transparan.
- b) Dalam melaksanakan audit (eksternal maupun internal) telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.
- c) Pengendalian perusahaan telah dilaksanakan dengan maksimal.
- d) Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- e) Menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen.

## 2) Komite Nominasi

Komite nominasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi (Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Nominasi mencakup :

- a) Pengkajian kompetensi calon Anggota Direksi dan Komisaris untuk posisi yang dimaksud.
- b) Pengkajian rencana suksesi.
- c) Evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.
- d) Pengusulan, menilai, dan memberikan rekomendasi atas calon-calon Direksi dan Komisaris BUMN.

## 3) Komite Remunerasi

Komite ini bertugas membantu Komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan dalam mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya (Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Remunerasi antara lain :

- a) Menyusun kebijakan penggajian, intensif Direksi dan Komisaris.
- b) Memastikan jumlah dan komposisi yang layak dan wajar dari remunerasi di perusahaan.

## 4) Komite Manajemen Resiko

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik

(*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dalam setiap mengambil tindakan dan keputusan, Direksi harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Atas hal tersebut Direksi wajib melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan bentuk unit kerja yang ada dibawah Direksi atau memberi penugasan unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Kewenangan dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain :

- a) Memberikan saran, masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko dan menerapkannya.
- b) Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko ke seluruh *stakeholders*.
- c) Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.

#### **g. Sekretaris Perusahaan**

Sekretaris perusahaan merupakan elemen penting dalam perusahaan yang mendukung keberhasilan implementasi GCG, hal tersebut disebabkan sekretaris perusahaan merupakan pihak penting bagi perusahaan dalam berhadapan dengan pihak ketiga (Effendi, 2009).

Dalam hal ini, sekretaris perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan perusahaan kepada *stakeholders*. Sekretaris perusahaan diangkat dengan kualifikasi profesionalisme yang memadai dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kinerja sekretaris perusahaan diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Direksi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, fungsi sekretaris perusahaan adalah:

- 1) Memastikan BUMN dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi apabila dibutuhkan.
- 3) Sebagai penghubung antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
- 4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan.

#### **h. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG**

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan :

### 1) Penilaian (*Assessment*)

Penilaian (*assessment*) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala tiap 2 (dua) tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN.

Penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku. Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

### 2) Evaluasi (*Review*)

Evaluasi (*review*) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (*self assessment*). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau jasa instansi pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang diterapkan sekretaris kementerian BUMN. Hasil

evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

**Tabel II-2. Penilaian Skor GCG Berdasarkan Keputusan Sekertaris Kementrian BUMN NO : SK-16/S.MBU/2012.**

Skor Penilaian	Predikat
Diatas 85	Sangat Baik
75-85	Baik
60-75	Cukup Baik
50-60	Kurang Baik
Dibawah 50	Tidak Baik

**Sumber : Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No : SK-16/S.MBU/2012.**

#### 4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang diambil dari beberapa referensi yaitu sebagai berikut :

**Tabel II-3. Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Wika Agustina Harahap (2016)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan pada Tahun 2010-2014	GCG, Kinerja Keuangan diukur dengan rasio keuangan yang ditetapkan standar BUMN	Pengukuran skor GCG sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan tidak menunjukkan keadaan yang tidak sejalan, dimana skor GCG mengalami peningkatan belum tentu kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik.	Skripsi
Raymond Wawondows (2014)	Analisis Impelementasi Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Bidang Cargo di Surabaya	<i>Accountability, Fairness, Independency, Responsibility,</i> dan <i>Transparency</i>	Implementasi terhadap prinsip-prinsip GCG dinilai sangat baik berdasar pada analisis dengan metode AHP dan telah terimplementasi secara keseluruhan dalam analisis kualitatif.	Jurnal
Muh. Arief Effendi (2009)	<i>The Power of Good Corporate Governance</i> teori	GCG di BUMN	-	Buku



Ristifani (2009)	Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<i>Good Corporate Governance</i> , Pengukuran Kinerja	Hubungan implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap Kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diketahui mempunyai hubungan searah yang sangat kuat, dimana implementasi prinsip GCG sangat mempengaruhi kinerja 83,53% dan sisanya sebesar 16,47% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar prinsip GCG.	Jurnal
Jaya Laksana (2015)	<i>Corporate Governance</i> Dan Kinerja Keuangan (Studi kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2012	Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan, Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan.	Jurnal
Nadia Guchi (2016)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Pada Tahun 2011-2014	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan	Penerapan GCG untuk menilai kinerja perusahaan belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor yang meningkat tidak diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan.	Skripsi

## B. Kerangka Berpikir

Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan listrik dan indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang

membalik diharapkan pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PLN pada pasar rumah tangga maupun industri dan bisnis masih merupakan peluang bisnis yang besar karena rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita masih rendah serta Indonesia sendiri masih dalam tahap awal industrial.

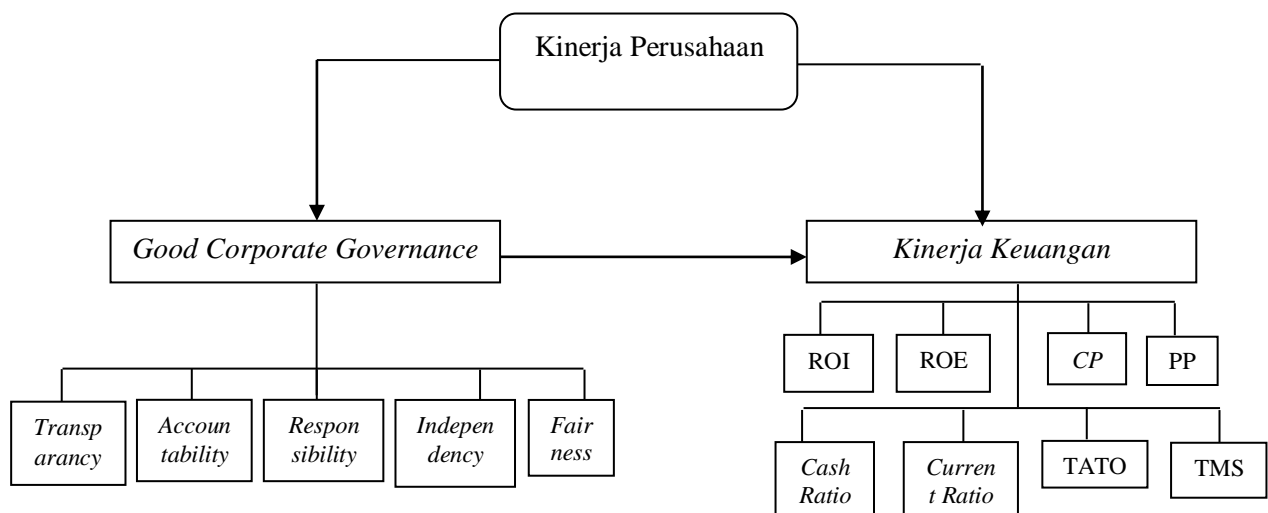
*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Penerapan GCG yang baik berdampak pada Kinerja Keuangan. Dengan adanya penerapan GCG diharapkan mampu untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. Penerapan dan pengolahan *corporate governance* juga mewujudkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatnya kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan Investor (Tjager, et al., 2003).

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan. Sesuai

dengan Standar Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, Perputaran Persediaan, *Total Asset Turn Over*, dan Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja keuangan, seperti pada penelitian Ristifani dan Jaya Laksana (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh antara GCG dengan Kinerja Keuangan. Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan skor capaian GCG dan Kinerja Keuangan yang diukur dengan menggunakan Standar Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan. Adapun definisi dari variabel penelitian diatas adalah sebagai berikut :

##### **1. *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar menciptakan kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pengukuran untuk tingkat *Good Corporate Governance* dilakukan dengan skor persentase *Good Corporate Governance* yang dilihat dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Untuk menganalisis penerapan *good corporate governance*, digunakan wawancara dengan indikator pertanyaan sebagai berikut :

**Tabel III-1. Indikator Wawancara GCG**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No. Pertanyaan
1	Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan.	Prinsip-prinsip GCG.	1. Transparansi	1,2,3,4
			2. Akuntabilitas	5,6
			3. Responsibilitas	7
			4. Independensi	8,9
			5. Kesetaraan & Kewajaran	10,11

## 2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelolah keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain. Kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 :

$$a. \text{Return On Equity (ROE)} = \text{Laba Bersih} / \text{Modal Sendiri} \times 100\%$$

$$b. \text{Return On Investment (ROI)} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

$$c. \text{Cash Ratio} = \text{Kas dan Setara Kas} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

$$d. \text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

$$e. \text{Collection Periods} = \text{Piutang Usaha} / \text{Pendapatan Usaha} \times 365 \text{ hari}$$

$$f. \text{Perputaran Persediaan} = \text{Total Persediaan} / \text{Total Pendapatan Usaha} \times 365 \text{ hari}$$

$$g. \text{TATO} = \text{Total Pendapatan} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

$$h. \text{TMS} = \text{Modal Sendiri} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka bukan berbentuk kalimat, seperti laporan keuangan yaitu laba rugi dan neraca serta laporan capaian Skor GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer, merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh pegawai/karyawan perusahaan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara berupa data laporan keuangan baik laporan laba rugi maupun neraca serta laporan capaian Skor GCG.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi dokumentasi terhadap sumber penelitian, yaitu yang dilakukan dengan memperoleh laporan keuangan perusahaan dan laporan capaian Skor GCG.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghasilkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja keuangan yang diukur dengan ROE, ROI, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, *Inventory Turn Over*, TATO, dan TMS.
2. Menganalisis penyebab *Return On Investment*, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri menurun.
3. Menganalisis penerapan GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
4. Menganalisis penerapan GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN(Persero) Wilayah Sumatera Utara.
5. Menarik kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Perusahaan Perseroan PT. PLN bergerak di bidang ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya dibidang gas ke bidang listrik.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN diubarkan dan dibentuk 2 Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas.

Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru. Kalau listrik mulai ada di wilayah Indonesia tahun 1893 didaerah Batavia (Jakarta Sekarang), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun ditanah petapakan kantor PLN cabang Medan yang sekarang di JL. Listrik NO.12 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi Sumatera Utara tersebut maka dengan Keputusan Direksi PLN No. Kpts

009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi 4 Cabang dan 1 Sektor, yaitu Cabang Medan, Cabang Binjai, Cabang Sibolga, Cabang Pematang Siantar (Berkedudukan di Tebing Tinggi) karena Pematang Siantar masih dikelola PLN Sektor Glugur.

Dalam SK Menteri ditetapkan pula pembagian kerja PLN jadi 11 eksploitasi, daerah distribusi dan 3 daerah pembangkitan. PLN eksploitasi I Sumatera Utara dirubah menjadi eksploitasi II Sumatera Utara. Unit-unit yang dibawah oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan (Jl. KL. Yos Sudarso No.284 Medan) pada saat sekarang ini yaitu unit pelaksana pendistribusian tenaga kerja terdiri dari : Cabang Medan, Cabang Binjai, Cabang Lubuk Pakam, Cabang Pematang Siantar, Cabang Rantau Prapat, Cabang Sibolga, dan Cabang Padang Sidempuan.

Dengan keluarnya peraturan pemerintah No.23/1994 tanggal 16 juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagai persero. Dimana abad 21 nanti, PLN harus mampu menghadapi tantangan yang ada, PLN harus mampu menggunakan tolak ukur internasional, dan harus mampu berswadaya tinggi, dengan manajemen yang berani transparan, terbuka, desentralisasi, *profit* dan *cost center*.

Dengan pembentukan organisasi baru PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PT. PLN (Persero) Wilayah II, maka fungsi-fungsi pembangkitan dan penyaluran yang sebelumnya dikelola PT. PLN (Persero) Wilayah II berpisah tanggung jawab pengelolaannya ke PLN pembangkitan dan penyaluran Sumbagut. Sementara

itu PT. PLN (Persero) Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. Pada tahun 2003 PT. PLN (Persero) Wilayah II berubah menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

## 2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran pelaksanaan pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sarana organisasi. Dan dalam pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang dinilai dari Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas dan Rasio Solvabilitas. Rasio keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

### a. Rasio Profitabilitas

#### 1) *Return On Equity* (ROE)

*Return on equity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini artinya posisi pemilik perusahaan semakin baik dan kuat, dan begitu pula sebaliknya.

Berikut adalah rumus *return on equity* dan tabel hasil perhitungan nilai *return on equity* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Ekuitas} \times 100\%$$

**Tabel IV-1. Perhitungan *Return On Equity* (ROE) PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Laba Bersih (a)	Total ekuitas (b)	ROE = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	(1.329.070.778.467)	(1.329.070.778.467)	100%	15%
2012	(4.499.921.960.135)	(4.499.921.960.135)	100%	
2013	(643.278.115.847)	(643.278.115.847)	100%	
2014	(1.471.630.956.130)	(1.471.630.956.130)	100%	
2015	(1.618.794.051.744)	(1.618.794.051.744)	100%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *return on equity* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 telah memperoleh nilai yang stabil yaitu sebesar 100% dan berada diatas standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 15%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai ROE yang baik. Namun, jika dilihat dari keadaan yang sesungguhnya bahwa perusahaan memiliki ekuitas negatif dan perusahaan mengalami kerugian, serta nominal keduanya juga memiliki jumlah yang sama.

## 2) *Return On Investment* (ROI)

*Return On Investment* merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan *netto*. Bagi perusahaan pada umumnya masalah efisiensi penggunaan modal lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien.

Berikut ini adalah rumus *Return On Investment* dan tabel perhitungan nilai ROI yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

**Tabel IV-2. Perhitungan Return On Investment (ROI) PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Laba Bersih (a)	Total aktiva (b)	ROI = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	(1.329.070.778.467)	3.097.782.214.906	-43%	18%
2012	(4.499.921.960.135)	3.288.420.661.601	-137%	
2013	(643.278.115.847)	3.855.486.744.564	-17%	
2014	(1.471.630.956.130)	4.171.601.070.012	-35%	
2015	(1.618.794.051.744)	4.288.761.177.013	-38%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai ROI yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Nilai ROI yang diperoleh selama tahun 2011-2015 hanya berada pada -137% sampai dengan -17%, dan nilai ROI yang paling rendah terjadi pada tahun 2012 dimana perusahaan memiliki nilai ROI sebesar -137%.

## b. Rasio Likuiditas

### 1) *Cash Ratio*

*Cash ratio* merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas yang dapat ditarik setiap saat. Berikut adalah rumus dari *cash ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{Cash Ratio} = \text{Kas dan Setara Kas} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

**Tabel IV-3. Perhitungan *Cash Ratio* PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Kas dan setara kas (a)	Hutang lancar (b)	Cash Ratio= (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	43.923.579.605	475.286.621.425	9%	35%
2012	52.304.089	444.672.859.713	0%	
2013	(9.817.969)	505.611.565.946	0%	
2014	(29.278.042.332)	505.515.293.549	-6%	
2015	(31.205.846.565)	556.066.822.906	-6%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cash ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan disebabkan menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan.

## 2) *Current Ratio*

*Current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Berikut adalah rumus *current ratio* dan tabel hasil perhitungan nilai *current ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

**Tabel IV-4. Perhitungan *Current Ratio* PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Aktiva lancar (a)	Hutang lancar (b)	Current Ratio= (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	285.183.084.024	475.286.621.425	60%	125%
2012	297.005.077.634	444.672.859.713	66%	
2013	877.626.338.582	505.611.565.946	174%	
2014	1.079.048.088.701	505.515.293.549	213%	
2015	1.086.952.897.571	556.066.822.906	195%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *current ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 telah meningkat, hanya pada tahun 2011-2012 nilai *current ratio* berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 125%, tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013-2015 nilai *current ratio* semakin meningkat dan berada diatas standar BUMN, yaitu diatas 125%.

### c. Rasio Aktivitas

#### 1) *Total Asset Turn Over* (TATO)

*Total asset turn over* merupakan rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan selama satu periode. *Total asset turn over* merupakan ukuran tentang seberapa jauh aktiva telah digunakan dalam kegiatan operasi berputar dalam satu periode tertentu. Berikut adalah rumus dan tabel hasil perhitungan TATO yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{TATO} = \text{Pendapatan Usaha} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

**Tabel IV-5. Perhitungan *Total Asset Turn Over* PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Pendapatan usaha (a)	Total Aktiva (b)	TATO = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	9.420.073.319.313	3.097.782.214.906	304%	120%
2012	10.138.516.056.893	3.288.420.661.601	308%	
2013	17.917.520.650.335	3.855.486.744.564	465%	
2014	20.989.484.006.534	4.171.601.070.012	503%	
2015	21.488.432.407.187	4.288.761.177.013	501%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai TATO mengalami peningkatan dan berada diatas standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 120%. Semakin besar perputaran rasio ini maka semakin baik bagi perusahaan.

## 2) Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi pendapatan usaha dengan persediaan. Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa besar efisien perusahaan mengatur persediannya, yaitu dengan menunjukkan berapa kali perputaran persediaan selama satu tahun. Berikut ini adalah rumus dan tabel hasil perhitungan perhitungan perputaran persediaan yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \text{Persediaan} / \text{Pendapatan Usaha} \times 365 \text{ hari}$$

**Tabel IV-6. Perhitungan Perputaran Persediaan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Persediaan (a)	Pendapatan usaha (b)	Perputaran Persediaan = (a/b)x365 hari	Standar BUMN
2011	162.471.854.259	9.420.073.319.313	6x	4 X
2012	189.207.118.899	10.138.516.056.893	7x	
2013	130.616.277.692	17.917.520.650.335	3x	
2014	128.909.507.050	20.989.484.006.534	2x	
2015	131.800.457.755	21.488.432.407.187	2x	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai perputaran persediaan mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2011-2012 nilai perputaran persediaan meningkat dan berada diatas standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 4x, tetapi pada tahun 2013-2015 nilai perputaran persediaannya menurun dan berada dibawah standar BUMN.

### 3) *Collection Period*

*Collection period* merupakan rasio yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mngumpulkan piutang selama satu periode. Berikut adalah rumus *collection period* dan tabel hasil perhitungan nilai *collection period* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{Collection Period} = \text{Piutang Usaha} / \text{Pendapatan Usaha} \times 365 \text{ hari}$$

**Tabel IV-7. Perhitungan *Collection Period* PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Piutang usaha (a)	Pendapatan usaha (b)	Collection period = (a/b)x365 hari	Standar BUMN
2011	62.906.306.692	9.420.073.319.313	2x	4 X
2012	95.798.344.240	10.138.516.056.893	3x	
2013	733.283.302.393	17.917.520.650.335	15x	
2014	967.706.314.205	20.989.484.006.534	17x	
2015	973.476.945.625	21.488.432.407.187	16x	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *collection period* sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 4x. Hanya ditahun 2011-2012 *collection period* berada dibawah standar BUMN, tetapi pada tahun berikutnya nilai *collection period* semakin meningkat dan berada diatas standar BUMN.

#### d. Rasio Solvabilitas

##### 1) Total Modal Sendiri (TMS)

Total modal sendiri yaitu rasio yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat direalisasi sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. Berikut ini adalah rumus dan tabel hasil perhitungan total modal sendiri yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.

$$\text{TMS} = \text{Modal Sendiri} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

**Tabel IV-8. Perhitungan Total Modal Sendiri PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara**

Tahun	Modal Sendiri (a)	Total Aktiva (b)	TATO = (a/b)x100%	Standar BUMN
2011	(1.329.070.778.467)	3.097.782.214.906	-43%	30-40%
2012	(4.499.921.960.135)	3.288.420.661.601	-137%	
2013	(643.278.115.847)	3.855.486.744.564	-17%	
2014	(1.471.630.956.130)	4.171.601.070.012	-35%	
2015	(1.618.794.051.744)	4.288.761.177.013	-38%	

Sumber : Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai total modal sendiri yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30-40%.

### 3. *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* nya.

Berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002).

Berikut ini adalah skor *Corporate Governance* yang diperoleh PT. PLN (Persero) selama tahun 2011-2015 :

**Tabel IV-9. Hasil skor GCG PT. PLN (Persero) selama tahun 2011-2015:**

Tahun	Skor GCG	Standar BUMN	Keterangan
2011	83,35%	75%-85%	Baik
2012	81,52%	75%-85%	Baik
2013	88,52%	75%-85%	Sangat Baik
2014	84,62%	75%-85%	Baik
2015	86,46%	75%-85%	Sangat Baik

Sumber : *Report Good Corporate Governance* PT. PLN (Persero)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa skor yang diperoleh PT. PLN (Persero) selama tahun 2011-2015 berada diatas standar BUMN dan termasuk kedalam predikat “sangat baik”.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh I Nyoman Tjager yang menyatakan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, hasil *corporate governance* belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan relatif menurun dan cenderung mengalami angka negatif. Adapun peranan kinerja keuangan dan *corporate governance* adalah sebagai berikut :

**1. Menganalisis Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.**

**a. *Return On Equity (ROE)***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *return on equity* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 telah memperoleh nilai yang stabil yaitu sebesar 100% dan berada di atas standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 15%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai ROE yang baik. Namun, jika dilihat dari keadaan yang sesungguhnya bahwa perusahaan memiliki ekuitas negatif dan perusahaan mengalami kerugian, serta nominal keduanya juga memiliki jumlah yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara bahwa perusahaan mengalami kerugian karena harga jual lebih kecil dari pada BPP nya, sedangkan ekuitas berasal dari saldo laba/rugi perusahaan pada tahun yang sama. Jadi, seberapa besar laba/rugi perusahaan maka sebesar itulah jumlah ekuitas perusahaan pada periode yang sama.

Kemudian ekuitas yang berasal dari saldo laba/rugi perusahaan dikirim ke kantor pusat setiap akhir tahunnya, karena Kantor Wilsu ini sekedar unit konsolidasi bukan holding. Jadi, jika ingin mengetahui seberapa besar ekuitas PT. PLN (Persero) maka Ia terletak di holding. Faktanya Kantor Wilsu tidak memiliki modal sendiri, Ia hanya menerima subsidi dari pusat untuk setiap keperluannya.

Karena ekuitasnya sudah dikirim ke kantor pusat setiap akhir tahunnya, maka pada awal tahun berikutnya ekuitas Wilsu kembali menjadi 0

(nol). Jadi, dari data yang diketahui bahwa ekuitas PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara berasal dari saldo laba/rugi perusahaan itu sendiri.

Tetapi, dari hasil perhitungan diatas dengan menggunakan rumus rasio keuangan, bahwa perusahaan memiliki nilai ROE yang stabil dan berada diatas standar yang telah ditetapkan BUMN.

**b. *Return On Investment (ROI)***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai ROI yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Nilai ROI yang diperoleh selama tahun 2011-2015 hanya berada pada -137% sampai dengan -17%, dan nilai ROI yang paling rendah terjadi pada tahun 2012 dimana perusahaan memiliki nilai ROI sebesar -137%. Menurunnya ROI menunjukkan bahwa perusahaan kurnag mampu dalam menjaga stabilitas finansialnya.

Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau rendahnya ROI, maka semakin kurang baik tingkat pengembalian investasi pada perusahaan, sebaliknya jika ROI semakin besar maka semakin baik tingkat pengembalian investasi.

**c. *Cash Ratio***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *cash ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun

2011-2015 mengalami penurunan dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan disebabkan menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Berarti perusahaan belum mampu dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang yang telah jatuh tempo dengan menggunakan kas perusahaan. Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Semakin tinggi rasio kas pada perusahaan berarti perusahaan mampu dalam memenuhi hutang jangka pendeknya, sebaliknya semakin rendah rasio kas pada perusahaan berarti perusahaan tidak mampu dalam memenuhi hutang jangka pendeknya.

**d. *Current Ratio***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *current ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 telah meningkat, hanya pada tahun 2011-2012 nilai *current ratio* berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 125%, tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013-2015 nilai *current ratio* semakin meningkat dan berada diatas standar BUMN, yaitu diatas 125%. Tingkat likuid dari suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio lancarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam membayar hutang jangka pendek nya atas aset lancar yang dimiliki.

**e. *Total Asset Turn Over (TATO)***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai TATO mengalami peningkatan dan berada diatas standar yang telah ditetapkan

BUMN sebesar 120%. Semakin besar perputaran rasio ini maka semakin baik bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah efisien dalam menggunakan aktiva nya. *Total Asset Turn Over* merupakan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dimana rasio ini menggambarkan kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu.

**f. Perputaran Persediaan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai perputaran persediaan mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2011-2012 nilai perputaran persediaan meningkat dan berada diatas standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 4x, tetapi pada tahun 2013-2015 nilai perputaran persediaannya menurun dan berada dibawah standar BUMN. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan.

**g. Collection Period**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *collection period* sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 4x. Hanya ditahun 2011-2012 *collection period* berada dibawah standar BUMN, tetapi pada tahun berikutnya nilai *collection period* semakin meningkat dan berada diatas standar BUMN. Semakin cepat piutang dikumpulkan maka semakin besar pula profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan.

**h. Total Modal Sendiri (TMS)**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai total modal sendiri yang diperoleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30-40%. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini berarti semakin besar modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

Jika rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik perusahaan dan sebagian dari aktiva lancar juga dibiayai oleh pemilik perusahaan. Sebaliknya jika rasio ini berada dibawah 100% berarti sebagian aktiva tetap nya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, sedang aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan tidak baik. Dimana rasio modal sendiri berada dibawah dari kisaran antara 30% dan 40%.

## **2. Menganalisis penyebab menurunnya kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2011-2015.**

### ***a. Return On Investment (ROI)***

Penyebab rasio ini menurun dan belum memenuhi standar dikarenakan perusahaan mengalami kerugian tiap tahunnya. Kerugian perusahaan disebabkan karena kenaikan beban yang dikeluarkan perusahaan terlalu tinggi dibandingkan pendapatannya. Dengan kata lain, biaya pokok produksinya lebih tinggi dibanding harga jual listrik



yang tersedia. Hal ini diartikan bahwa perusahaan belum mampu untuk mengefisiensikan beban dan penggunaan modal dalam perusahaan.

**b. Cash Ratio**

Penyebab rasio ini menurun dan belum memenuhi standar BUMN dikarenakan kurang tersedianya uang kas didalam perusahaan untuk membayar hutang lancarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, hal ini juga disebabkan karena sistem pembayaran kas nya terletak dikantor pusat, sehingga PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dibatasi untuk pembayaran hutang lancarnya.

**c. Perputaran Persediaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengatakan bahwa menurunnya perputaran persediaan karena, untuk menyediakan stock di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk periode selanjutnya tidaklah mudah/sulit dicari dipasaran, sehingga persediaan nya tidak bisa secukupnya, jadi harus dlebihkan untuk periode berikutnya.

**d. Total Modal Sendiri**

Penyebab menurunnya rasio ini karena kurangnya subsidi dari pemerintah, dan faktanya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak memiliki modal sendiri, karena perusahaan ini hanya menerima subsidi dari pusat untuk setiap keperluannya, sehingga sebagian aktiva tetap nya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, sedang aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal

pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak dibiayai oleh pusat PT. PLN (Persero), atau perusahaan banyak didanai dari hutang-hutang perusahaan.

### **3. Menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.**

#### **a. Transparansi (*Transparency*)**

Dalam prinsip ini perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses serta dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Keterebukaan informasi perusahaan ada di situs [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) dan contact center 123. Perusahaan Listrik Negara menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja, termasuk kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris. Informasi yang disajikan PLN juga meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah di audit, serta sistem alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Dalam prinsip ini perusahaan diharapkan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, serta memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

PLN menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator dipasar modal yaitu, membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit dengan anggota-anggota yang berkompeten dibidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen.

**c. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Dalam prinsip ini perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat,

untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Beberapa kebijakan dan praktek operasional yang menunjukkan bahwa PLN dikelola dan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini seperti, setiap insan PLN dituntut menunjukkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima. Remunerasi berbasis kinerja ini sejalan dengan ketentuan peraturan terbaru dari Kementerian BUMN.

**d. Kemandirian (*Independency*)**

Penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para direktur dengan anggota dewan komisaris ataupun antara masing-masing anggota direktur dan dewan komisaris.

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara *independent*, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

**e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Memperlakukan seluruh *stakeholder* secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh PT. PLN (Persero) juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan. Kesetaraan dan kewajaran juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Pada keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia tersebut, PLN hanya mendasarkan pada kompetensi, kemauan dan kinerja setiap karyawan.

**4. Menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.**

Berdasarkan Skor dari penerapan GCG pada tahun 2011-2015 dapat dikategorikan dalam keadaan sangat baik. Sedangkan untuk kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 mengalami penurunan.

Penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak menunjukkan keadaan yang sejalan. Dimana skor GCG yang mengalami peningkatan belum tentu kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Terbukti dengan skor GCG pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara meningkat dan memperoleh skor tinggi, tetapi kinerja keuangan perusahaannya mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, GCG belum mampu meningkatkan

Kinerja Keuangan karena penerapan GCG ini tidak langsung ditujukan pada Kinerja Keuangan perusahaan. Penerapan GCG di PT. PLN (Pesero) ini dikategorikan bagus, karena sesungguhnya penerapan GCG lebih cenderung kepada proses Kinerja Perusahaan, tetapi Kinerja Keuangan bukanlah tujuan utama dari proses penerapan GCG, sehingga ia tidak berpengaruh langsung pada Kinerja Keuangan Perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan GCG yang baik belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan yang diukur dengan *Retrun On Investment* menurun disebabkan, harga jual listriknya lebih rendah daripada biaya pokok produksinya, dan masih banyaknya pelanggan yang menggunakan listrik subsidi. *Cash ratio* menurun disebabkan kurang tersedianya kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban lancarnya, dan dikarenakan sistem pembayaran kasnya terletak dikantor pusat sehingga dibatasi untuk pembayaran hutang lancarnya. Perputaran persediaan menurun karena untuk menyediakan stock di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk periode selanjutnya tidaklah mudah/sulit dicari dipasaran, sehingga persediaannya tidak bisa secukupnya, jadi harus dlebihkan untuk periode berikutnya. Total modal sendiri menurun disebabkan karena kurangnya subsidi dari pemerintah, dan faktanya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak memiliki modal sendiri, karena perusahaan ini hanya menerima subsidi dari pusat untuk setiap keperluannya, sehingga sebagian aktiva tetapnya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, sedang aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak

dibiayai oleh pusat PT. PLN (Persero), atau perusahaan banyak didanai dari hutang-hutang perusahaan.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan menurut Azhar Maksum, manfaat dari penerapan GCG adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. I Nyoman Tjager juga menyatakan bahwa *Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tetapi, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wika Agustina Harahap menunjukkan hasil yang sama dimana GCG belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari skor GCG yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relatif rendah dan menurun.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis skor GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Return On Investment* belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 15%. Penyebab rasio ini belum memenuhi standar dikarenakan perusahaan mengalami kerugian tiap tahunnya. Kerugian perusahaan disebabkan karena kenaikan beban yang dikeluarkan perusahaan terlalu tinggi dibandingkan pendapatannya. Dengan kata lain, biaya pokok produksinya lebih tinggi dibanding harga jual listrik yang tersedia. Hal ini diartikan bahwa perusahaan belum mampu untuk mengefisiensikan beban dan penggunaan modal dalam perusahaan.
2. *Cash Ratio* belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan disebabkan menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Berarti perusahaan belum mampu dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang yang telah jatuh tempo dengan menggunakan kas perusahaan. Hal ini juga disebabkan karena sistem pembayaran kasnya terletak dikantor pusat, sehingga PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dibatasi dalam pembayaran hutang lancarnya.



3. Perputaran Persediaan belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 4x. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan. Penurunan perputaran persediaan disebabkan karena untuk menyediakan stock di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk periode selanjutnya tidaklah mudah/sulit dicari dipasaran, sehingga persediaan nya tidak bisa secukup nya, jadi harus dlebihkan untuk periode berikutnya.
4. Total Modal Sendiri belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30-40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan tidak baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya subsidi dari pemerintah, dan faktanya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak memiliki modal sendiri, karena perusahaan ini hanya menerima subsidi dari pusat untuk setiap keperluannya, sehingga sebagian aktiva tetap nya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, sedang aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak dibiayai oleh pusat PT. PLN (Persero), atau perusahaan banyak didanai dari hutang-hutang perusahaan.
5. Penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara belum tentu dapat membuktikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor yang mengalami peningkatan, tidak diikuti

dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa rasio yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN antara lain ROI, *Cash Ratio*, Perputaran Persediaan, dan Total Modal Sendiri.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan penialian terhadap GCG dalam mengukur kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No KEP-100/MBU/2002, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, agar selalu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai kinerja sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada.
2. Perusahaan sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik.
3. Bagi masyarakat, agar selalu membayar listrik tepat waktu, jangan sampai lewat batas waktu yang telah ditentukan, guna melancarkan kinerja perusahaan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan masing-masing variabel yang mampu mengarah pada permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bella Novia Rizky (2015). "Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Bena Eka Putri (2014). "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Purnama Semesta Alamiah". *Jurnal Manajemen Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Agora Vol.2, No.2 (2014).
- Erlina Yukawati (2013). "Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Rakabu Sejahtera di Sragen". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Erni R. Ernawan (2011). *Business Ethhics – Etika Bisnis Edisi Revisi*. PT. Alfabeta dan Implementasi, PT. Salemba Empat : Jakarta.
- F. Iflakhul Khamidah (2015). "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Dan Likuiditas". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Narotama : Bandung. Hal 1-19.
- Harahap, W. Agustina. (2016). *Analisis Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jaya Laksana (2015). "Corporate governance dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)". *E-Jurnal Akuntansi*, Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 11.1 (2015) : 269-288.
- Kasmir (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri BUMN No : Per-10/MBU/2011. *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Jakarta.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-100/MBU/2002. *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/MBU/2002. *Good Corporate Governance*.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate (GCG)*. Jakarta.

M. Arief Effendi (2009). *The Power Of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.

Raymond Wawondos dan Ronny H. Mustamu (2014). “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance”. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Agora Vol.2, No.2, (2014).

Ristifani (2009). “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Hubungannya Terhadap Kinerja Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, (2009). Hal 1-28.

Tjager et.al (2003). *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prenhallindo : Jakarta.